

Judul : Jemaah Umrah Berhak Memilih Dong...
Tanggal : Minggu, 24 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Sikapi Desakan PPIU

Jemaah Umrah Berhak Memilih Dong...

SEJUMLAH asosiasi penyelenggara haji dan umrah mendesak Pemerintah dan DPR untuk melarang jemaah melakukan umrah mandiri. Usulan ini disampaikan terkait proses revisi UU Haji dan Umrah.

Dalam praktiknya, banyak jemaah asal Indonesia yang melakukan umrah mandiri. Alasannya, biaya lebih murah dan mereka sudah memahami prosedur serta ketentuan saat menjalankan ibadah umrah.

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj mengatakan, Pemerintah dan DPR sebaiknya melarang praktik umrah mandiri demi melindungi jemaah dan pelaku usaha di sektor tersebut.

"Kalau kemudian Pemerintah dan DPR ingin melindungi ekosistem dan pelaku usaha, idealnya adalah umrah mandiri itu tidak dibuka pintunya," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Mustolih menyebutkan, ada sejumlah risiko apabila umrah mandiri diizinkan. Antara lain jemaah umrah berpotensi tersesat di Arab Saudi, hingga berpotensi menjadi korban perdagangan manusia.

Sedangkan pelaksanaan umrah yang berada di bawah naungan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) lebih mengedepankan tanggung jawab terhadap keselamatan jemaah.

"Ketika ada PPIU, PPIU lah yang kemudian bertanggung jawab untuk mengawal dari berangkat manasik sampai dengan pulang," ujarnya.

Sementara dari sisi pelaku usaha, pemberian izin terhadap umrah mandiri berpotensi membuat para pekerja, terkait PPIU, akan kehilangan pekerjaannya. "Jika RUU Haji ini diketuk dan umrah mandiri ini didorong, yang akan terpengaruh adalah teman-teman PPIU, teman-teman travel. Ini akan berdampak luas, termasuk pengangguran," kata Mustolih.

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang membantah pembahasan RUU Haji dan Umrah akan melarang praktik umrah mandiri. Terlebih, kata dia, umrah mandiri makin populer menyusul aneka kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi bagi masyarakat internasional untuk memasuki negaranya.

Sementara itu, juru bicara 13 Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Firman M Nur mengatakan, alasannya menolak legalisasi umrah mandiri yang masuk ke dalam RUU Haji dan Umrah. Salah satunya, kata dia, penyelenggaraan umrah mandiri minim perlindungan bagi jemaah.

"Kami khawatir (yang) akan hadir adalah oknum-oknum mungkin yang tidak bertanggung jawab," kata dalam keterangan persnya, Senin (18/8/2025).

Terpisah, pegiat umrah man-

diri Eaz Eryanda menyatakan, praktik umrah mandiri selama ini tetap berjalan. "Kalau bisa dimasukkan ke RUU Haji dan Umrah, harapannya dirapikan prosedurnya agar lebih jelas dan sah," usulnya.

Eaz mengungkapkan, problematika pelaksanaan umrah seperti jemaah terlantar, hotel tidak sesuai, maupun kasus overstay bukan hanya terjadi pada jemaah umrah mandiri, tetapi juga dialami jemaah yang berangkat melalui travel resmi.

"Di Saudi sendiri sebenarnya sudah rapi. Jemaah yang pakai visa umroh wajib punya transportasi resmi dan jika ada masalah kesehatan langsung ditangani, bahkan dijemput ambulans. Jadi kalau diatur di Indonesia, akan lebih baik lagi," sebutnya.

Eaz pun meminta agar Kementerian Agama (Kemenag) menyediakan platform resmi untuk bimbingan umrah yang dapat diakses jemaah umrah mandiri. Dia berharap, polemik yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini bisa segera berakhir dengan dimasukkannya aturan umrah mandiri ke dalam RUU Haji dan Umrah.

"Harapannya dilegalisasi supaya tidak ada lagi pihak yang menyalahkan. Kami juga lebih nyaman saat safar umrah mandiri. Tujuannya agar umrah kaum muslimin bisa berjalan

maabrur," tandasnya.

Di media sosial X, warganet menilai Pemerintah tidak perlu membatasi atau melarang umrah mandiri. Para jemaah perlu diberikan pilihan untuk menjalankan umrah. Apakah mau menggunakan jasa travel umrah atau mandiri, dimana masing-masing ada konsekuensinya.

Akun @Didi_margo menilai, usulan pelaku usaha terkait pelarangan umrah mandiri adalah upaya untuk melindungi kepentingan usahanya. "Takut ya jemaah umrah yang pake travel kalah sama jemaah umrah mandiri yang memesan tiket PP, hotel dan urusan visa umrah sendiri. Padahal sekarang banyak loh cara dan tips pergi umrah mandiri di internet," tulisnya.

Akun @xolofextstephy berpendapat, kalau masih awam dan baru pertama kali sebaiknya berangkat umrah dengan menggunakan jasa travel. "Kalau masih awam jangan pergi umrah mandiri, karena bakal ribet mikirin akomodasi, tata cara, busana, dan rukun umrahnya. Kecuali kamu berangkat sama yang sudah belasan kali umrah," katanya.

Senada, @sardensaostomat menekankan, umrah adalah perjalanan ibadah yang membutuhkan ilmu dan bukan perjalanan wisata karena ada rukun, syarat dan sunnahnya. "Tapi jika merasa mampu untuk umrah

tanpa muthawif dan paham dan kondisi negara / kota yang hendak dituju ya gak apa-apa, karena umrah mandiri memang lebih murah dan efisien secara biaya," terangnya.

Akun @bluendert menyarankan untuk mencoba dua-duanya, pakai travel dan mandiri. "Pertama pake travel dulu, nanti kalau sudah tau medannya bagaimana dan kegiatan/suasana disana baru jalur mandiri. Biar nggak zonk dan kebingungan. Itu yang bikin video umrah mandiri karena dia sudah berkali-kali kesana," ujarnya.

Akun @dkn9699 mengaku sudah pernah merasakan umrah mandiri dan pakai travel. "Alhamdulillah saya pernah ngerasain dua-duanya, dan menurut saya mending pake travel. Karena mandiri tuh banyak pengeluaran tak terduga, ya mungkin karena saya kurang survei juga. Apalagi ini yang baru umrah pertama kali, sudah paling bener sama travel," sarannya.

Sementara, @adrbjm_4002 mengungkapkan, perbedaan biaya umrah mandiri dengan umrah dengan travel lumayan besar. "Makanya travel umrah pada menolak legalisasi umrah mandiri, karena mereka ngambil untungnya bisa sampai 50 persen dari biaya umrah. Begitu juga kalau dibuka marketplace secara global, pasti banyak yang kalah bersaing," sebutnya. ■ **OSP**